URGENSI PENDAFTARAN HAK CIPTA TARI SEKAR SIBANG DESA SIBANGKAJA KABUPATEN BADUNG

I Gusti Ayu Amanda Ardhanawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungamanda123@gmail.com
Dewa Ayu Dian Sawitri, fakultas Hukum Universitas Udayana
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i11.p5

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung dan mengetahui bagaimana mekanisme pendaftaran hak cipta dari karya seni tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan karya seninya dari adanya plagiarisme atau peniruan dan penggunaan karya seni tanpa izin berupa hak moral dan hak ekonomi serta penghargaan atas pencapaian dalam menghasilkan suatu karya intelektual. Pengajuan pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Konsultan HKI yang sudah terdaftar, dan Kantor Wilayah Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Adapun tata cara atau mekanisme pencatatan hak cipta Tari Sekar Sibang dapat diajukan secara online atau elektronik dengan melakukan registrasi akun, melampirkan beberapa dokumen penting, seperti surat-surat sesuai ketentuan yang ditetapkan, formulir pendaftaran yang telah terisi dan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP), apabila pemohon adalah badan hukum wajib menyertakan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum, beberapa contoh dari karya atau ciptaan, dan membayar biaya pendaftaran. Setelah pemeriksaan formal, permohonan akan diverifikasi, dan apabila memenuhi syarat, pemohon akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan serta nama ciptaan tersebut akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencatatan Ciptaan, Seni Tari.

ABSTRACT

This research aims to find out the urgency of registering copyright for Sekar Sibang dance works in Sibangkaja Village, Badung Regency and to find out the mechanism for registering copyright for Sekar Sibang dance works in Sibangkaja Village, Badung Regency. This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that the urgency of registering copyright for Sekar Sibang dance works in Sibangkaja Village, Badung Regency is to provide legal protection to creators and their works of art from plagiarism or imitation and use of works of art without permission in the form of moral and economic rights as well as appreciation for achievements in producing an intellectual work. Applications for recording copyright works at the Ministry of Law and Human Rights can be submitted through the Directorate General of Intellectual Property Rights, registered IPR Consultant Legal Counsel, and Regional Offices of the Indonesian Ministry of Law and Human Rights throughout Indonesia. The procedure or mechanism for recording copyright for the Sekar Sibang Dance can be submitted online or electronically by register an account, attach several important documents, such as letters in accordance with the provisions stipulated, a registration form that has been filled in and completed with a Resident Identity Card (KTP), if the applicant is a legal entity, he must include a photocopy of a copy of the deed of establishment of the legal entity, several examples of work or creation, and pay the registration fee. After a formal examination, the application will be verified, and if it meets

the requirements, the applicant will receive a letter of creation registration and the name of the work will be announced in the public register of works.

Key Words: *Legal Protection, Copyright Registration, Dance Art.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu karya seni dilahirkan oleh manusia sebagai suatu bentuk keindahan yang mengungkapkan ekspresi dari kehidupan kita. Setiap karya seni yang diciptakan manusia tentu merupakan sebuah hasil dari olah pikir atau intelektual manusia. Setiap gerakan dalam tarian Bali memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Gerakan yang lemah gemulai dan anggun pada saat yang sama, dengan sentuhan artistik yang mencerminkan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Sibangkaja yaitu Ni Nyoman Rai Sudani S.H., beliau mengatakan bahwa ada salah satu tarian yang menjadi ciri khas dari Desa Sibangkaja, tarian itu bernama tari Sekar Sibang. Tari Sekar Sibang merupakan tari maskot Desa Sibangkaja. Tari Sekar Sibang dipertontonkan sebagai hiburan sekaligus media untuk memperkenalkan Desa Sibangkaja secara filosofis kepada masyarakat luas. Beliau mengatakan tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman dari Desa Sibangkaja, beliau bernama I Gusti Ngurah Agung Sasmitra Wiguna, S.E. Tarian ini memiliki makna dimana bunga-bunga ini diharapkan bisa menjadi tauladan bahwasannya kita sebagai manusia hendaknya bisa bermanfaat dan berguna bagi sekitar serta memiliki sikap yang sangat bertanggung jawab dan juga mampu memberikan perlindungan atau mengayomi berdasarkan sifat kesatria yang berlandaskan kesucian. Tarian ini merupakan salah satu aset intelektual, maka penting mendaftarkan tari Sekar Sibang guna menghargai kemampuan pencipta tari ini dalam mengarahkan pikiran untuk menciptakan sebuah karya seni tari dengan makna sehingga menjadi sebuah ciri khas dari Desa Sibangkaja.

Tari Sekar Sibang dianggap sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual dan penting untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Pencipta tari Sekar Sibang memegang hak eksklusif atas karyanya yang dikenal sebagai hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"¹. Seniman tari, khususnya pencipta tari Sekar Sibang, memiliki hak untuk mendapat hak cipta dari karyanya. Tarian diakui sebagai jenis karya yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam UUHC, Pasal 40 ayat (1) huruf e. Pendaftaran karya tari seperti tari Sekar Sibang dianggap cukup penting untuk mengatasi masalah pembajakan serta klaim dari pihak lain yang mengklaim karya yang sebenarnya bukan hasil kreativitas mereka. Karya-karya yang tidak mencantumkan nama pencipta serta informasi tentang tanggal pembuatannya berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain. Mereka mungkin menjiplak atau memanfaatkan karya tersebut tanpa bertanggung jawab, baik untuk keuntungan ekonomi maupun tidak. Dari perspektif ekonomi, hal ini bisa berdampak pada potensi royalti yang seharusnya diterima pencipta. Apabila karya digunakan tanpa

¹ Tian Marlionsa, A A Ngr; Sukihana, Ida Ayu. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2017) : 2303-0569.

izin, pencipta tidak akan mendapatkan keuntungan dari royalti tersebut.² Seperti kejadian pada klaim yang dilakukan oleh pihak Malaysia terhadap beberapa budaya tradisional Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai warisan budaya. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perlindungan untuk pencipta karya seni. Padahal, proses menciptakan karya seni memerlukan pemikiran, waktu, kreativitas, tenaga, hingga biaya yang lumayan besar. Oleh karena itu, seharusnya pencipta karya seni diberi penghargaan baik secara materiil maupun non-materiil.³

Sesungguhnya sebelum adanya jurnal ini terdapat beberapa jurnal yang membahas tentang pendaftaran hak cipta, namun pada jurnal ini terdapat inovasi dalam bidang hukum khususnya dalam hal perlindungan hak cipta terhadap karya seni tari. Adapun dua jurnal yang menjadi pembanding, yaitu jurnal yang ditulis oleh Siti Latifah dan Anthon Fathanudien yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".⁴ Namun focus permasalahan yang dibahas lebih mengarah pada perlindungan hukum pada hak cipta motif batik serta mekanisme atau prosedur pendaftaran hak cipta batik secara langsung atau non-elektronik. Selanjutnya terdapat jurnal lainnya yang ditulis oleh Yunita Maya Putri, Rehulina, Amelia Hani Saputri, Tristiyanto yang berjudul "Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung".⁵ Permasalahan yang dibahas lebih berfokus pada diseminasi mengenai perlindungan hukum hak cipta karya seni dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan para pekerja seni dalam menerapkan pengetahuan terkait hak cipta. Perbedaan jurnal ini dengan dua jurnal sebelumnya terlihat dari latar belakang diperlukannya perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni dan perbedaan mekanisme pendaftaran yang dibahas. Permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini juga berbeda yakni mengenai "Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Tari Sekar Sibang Desa Sibangkaja Kabupaten Badung", dan menjelaskan mekanisme atau prosedur mengenai pendaftaran hak cipta untuk karya seni tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja, Kabupaten Badung secara elektronik atau *online*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung?

² Johani, Sang Ayu Nyoman; Wiryawan, I Wayan; Mudana, I Nyoman. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 8, (2019) : 2303-0569.

³ *Ibid.* Hal. 4.

⁴ Latifah, Siti & Anthon Fathanudien. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)." *Mahkamah*, Vol. 5, No.1 (2020). [10.24235/mahkamah.v5i1.6564](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6564).

⁵ Putri, Yunita Maya. "Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung." *Jurnal Sumbangsih 2*, No. 1 (2021). 21. [10.23960/jsh.v2i1.29](https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.29).

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan sesungguhnya dalam penulisan jurnal ini tidak lain untuk memahami dan mengetahui :

1. Urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung.
2. Mekanisme pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung.

II. Metode Penelitian

Studi tentang pelaksanaan pencatatan hak cipta tari Sekar Sibang Desa Sibangkaja Kabupaten badung menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk mengamati implementasi hukum secara konkret dan mengeksplorasi cara kerja hukum dalam konteks masyarakat. Metode yang diterapkan pada penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap masalah dengan merujuk pada ketentuan hukum yang tercantum dalam UUHC, serta mengamati bagaimana implementasinya dalam konteks sosial masyarakat.

Pada dasarnya studi dengan metode hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Mengenai data primer diperoleh langsung melalui lapangan dengan responden atau informan terkait studi mengenai Karya Seni Tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung. Di sisi lain, data sekunder berasal dari studi pustaka. Sesudah data dan informasi yang dikumpulkan dianggap lengkap, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Proses ini mencakup klasifikasi dan seleksi data menurut kualitas dan akurasinya sehingga dapat memberikan Solusi terhadap masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Karya Tari Sekar Sibang Di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung

Hak yang muncul dari hasil karya, ide, dan kreatifitas manusia serta memunculkan nilai ekonomi untuk kebermanfaatan kehidupan manusia dikenal dengan sebutan hak Kekayaan Intelektual (HKI). Manifestasi obyektif kemampuan intelektualitas ini tidak lain menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, perasaan, dan sastra yang kemudian menghasilkan suatu hal yang kita sebut dengan Karya. HKI tidak hanya dimiliki, tetapi diciptakan oleh intelektualitas manusia. Oleh karena itu, karya-karya yang dihasilkan melalui usaha tenaga, pikiran, dan kreativitas manusia seharusnya dilindungi dengan sistem hukum yang disebut atau dikenal dengan sebutan Kekayaan Intelektual. Hak cipta pada dasarnya merupakan komponen dalam HKI secara keseluruhan. Dalam Persetujuan TRIPs, hak cipta diatur dalam Artikel 9-14, dimana Artikel 9 mengamanatkan perlindungan hak cipta untuk negara-negara anggota sesuai dengan Konvensi Bern.⁶ Didefinisikan dalam Pasal 1 UUHC, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Hak ini timbul setelah ciptaan yang dihasilkan melalui kreativitas intelektual pencipta (*human intellect*) diwujudkan dengan nyata atau obyektif (*expression work*), dengan konsisten mengindahkan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.

⁶ Dharmawan, N.K.S., dkk. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Yogyakarta, Deepublish, (2016), 35.

Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan setiap generasi, serta mengembangkan warisan budaya melalui penciptaan karya dan kreasi baru. Pengembangan budaya melalui karya dan kreativitas ini dimulai dari berbagai karya budaya lokal di setiap daerah. Salah satunya adalah tari Sekar Sibang yang terdapat di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung. Tari Sekar Sibang merupakan tari maskot Desa Sibangkaja. Tari Sekar Sibang dipertontonkan sebagai hiburan sekaligus media untuk memperkenalkan Desa Sibangkaja secara filosofis kepada masyarakat luas. Tari ini ditarikan oleh 7 (tujuh) orang penari perempuan sebagai representasi jumlah banjar di Desa Sibangkaja. Tari ini pertama kali ditampilkan dalam pagelaran Festival Banglor, di Kabupaten Badung tanggal 27 Oktober 2023. Adanya tari maskot ini mencerminkan karya seni yang ada di Desa Sibangkaja sudah banyak berkembang, sehingga penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu atau pencipta karya seni serta karya dari pencipta. Perlindungan kekayaan intelektual karya seni dapat dilakukan melalui pelaksanaan pendaftaran atau pencatatan hak cipta dari suatu karya seni.

Pendaftaran karya seni tari memang bukan suatu kewajiban bagi para pencipta karya seni karena karya cipta akan tetap mendapatkan perlindungan hak cipta meskipun tidak dicatatkan. Meskipun tidak wajib, pendaftaran hak cukup penting untuk melindungi suatu karya yang telah diciptakan terutama dari masalah plagiarisme atau peniruan. Ketika terjadi masalah atau sengketa seperti ini terkadang pencipta yang tidak memiliki hak cipta pada karyanya dapat dirugikan karena kesulitan atau bahkan tidak dapat membuktikan bahwa karya tersebut adalah milik pencipta meskipun sebenarnya karya tersebut memang ciptaannya. Jika hal tersebut terjadi, maka pada dasarnya tidak ada perlindungan hak cipta bagi karya yang tidak dicatatkan. Selain itu, pendaftaran karya cipta juga penting untuk memberikan pengakuan resmi terhadap karya cipta tersebut secara hukum. Sebenarnya hak cipta tidak dapat melindungi ide dan gagasan dari pencipta, karena perlindungan hak cipta hanya berlaku untuk karya yang berwujud spesifik, individu, dihasilkan dari intelektualitas, keahlian, serta kreativitas penciptanya. Dengan kata lain, karya tersebut harus dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁷ Perlindungan kekayaan intelektual ini tidak hanya akan melindungi karya-karya pencipta karya tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi budaya dan masyarakat saat ini.⁸

Ketika sebuah karya cipta didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, pencipta akan memperoleh manfaat tersendiri, oleh karena itu penting untuk mengurus pendaftaran karya cipta di instansi yang berwenang. Adapun beberapa hal penting yang mendasari urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung meliputi:

- a. Pencipta tari Sekar Sibang akan memperoleh kejelasan hukum dan hak-hak dari pencipta tari Sekar Sibang untuk periode waktu tertentu. Menurut UUHC, perlindungan hukum bagi pencipta tari Sekar Sibang mencakup hak moral dan ekonomi. Untuk hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC meliputi hak untuk mencantumkan nama saat karya digunakan secara umum, serta hak untuk mempertahankan keutuhan karya tanpa batas

⁷ Ningsih, Wahyu Kartika, dan S.H. Inayah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

⁸ Asri Mas Lestari, Ni Made; Dedy Priyanto, I Made; Sukerti, Ni Nyoman. Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2016) : 2303-0569.

waktu menurut undang-undang.⁹ Sementara itu, hak ekonomi (economic right) adalah hak materiil untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan dan produknya, dimulai dari Pasal 8 yang memberikan perlindungan dari saat karya diciptakan hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Setelah tari Sekar Sibang didaftarkan dan pencipta mendapatkan hak atas karyanya, pencipta memiliki hak penuh untuk menentukan apakah karya ciptanya dapat digunakan atau tidak dalam suatu acara. Untuk mendapatkan izin saat ingin menggunakan karya dari pencipta biasanya melalui kerja sama antara pencipta dan pihak yang ingin menggunakan tari Sekar Sibang. Dalam banyak kasus, kerja sama tersebut melibatkan pembayaran kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan karyanya. Keuntungan ini termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta tari Sekar Sibang.

- b. Pencipta tari Sekar Sibang akan memperoleh penghargaan atas pencapaian dalam usaha atau upaya menciptakan karya intelektual.¹⁰ Pemberian penghargaan atas suatu pencapaian dari pencipta tari Sekar Sibang sebagai bentuk keadilan dan penghargaan terhadap kerja kerasnya. Oleh karena itu, pencipta tari Sekar Sibang memperoleh Penghargaan berupa surat pencatatan ciptaan atas karya seni tari dalam bentuk dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terbuka untuk publikasi dan promosi.
- c. Pencipta tari Sekar Sibang akan memperoleh kemudahan dalam pembuktian jika muncul sengketa yang berkaitan dengan karya dari pencipta. Perlindungan terhadap ciptaan secara langsung berlaku sejak suatu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan berdasarkan proses pendaftaran. Meski demikian, surat pendaftaran karya cipta dapat berfungsi untuk menjadi bukti di awal pengadilan apabila terjadi sengketa terkait ciptaan. Pendaftaran karya cipta seperti tari Sekar Sibang dapat memudahkan pembuktian dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak cipta karya tersebut. Hal ini disebabkan karena pencatatan karya cipta dapat berfungsi sebagai bukti dalam menyelesaikan sengketa, baik di pengadilan maupun luar pengadilan. Sengketa terkait hak cipta umumnya disebabkan oleh pelanggaran oleh beberapa pihak yang diatur dalam Pasal 112-120 Undang-Undang Hak Cipta.¹¹
- d. Pencipta tari Sekar Sibang memperoleh perlindungan atau antisipasi sebelum adanya peniruan karya ciptanya karena dari negara menjamin pelaksanaan karya cipta hanya diperuntukkan bagi pihak yang memiliki hak. Pendaftaran dan pencatatan karya cipta tari Sekar Sibang sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

⁹ Ariasih, Ni Putu Epy, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Legal Analogy Journal* 3, No.1 (2021) :113. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3030.111-115> .

¹⁰ Badar, Anisa Am, dan Nabila. " Mengapa Hak Cipta Perlu di Catatkan Padahal Perlindungannya Bersifat Otomatis." Jakarta (2021). Diakses melalui link <https://ambadar.co.id/copyright/mengapa-hak-cipta-perlu-di-daftarkan-padahal-perlindungannya-bersifat-otomatis/> . Terakhir diakses pada 11 Oktober 2024.

¹¹ Rumbekwan ,R.G.E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga." *Lex Crimen Journal* 5, No.3 (2016) : 130.

karya tersebut jika terjadi pelanggaran¹² Suatu karya akan mendapatkan perlindungan ketika ada pelanggaran yang berkaitan langsung dengan karya tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi saat pemilik hak cipta atau pencipta yang karyanya digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab atau sebelumnya tidak meminta izin pada pemilik hak cipta untuk menggunakan karyanya demi mendapat keuntungan ekonomi. Perlindungan ini bisa berupa perlindungan hukum yang diatur baik tertulis ataupun tidak tertulis.¹³ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan klaim kepemilikan oleh pihak lain tanpa izin, sehingga memastikan bahwa manfaat ekonomi dan non-ekonomi dari pengetahuan ini dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mengembangkannya di masa depan. Selain itu, pendaftaran hak cipta untuk karya tari juga penting untuk mendapatkan pengakuan secara resmi terhadap karya cipta tersebut. Menurut Pasal 31-38 jo Pasal 40 Ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC tahun 2014, tarian tradisional baik yang penciptanya diketahui maupun tidak diketahui, dianggap sebagai salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang.¹⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pendaftaran dan pencatatan karya cipta tari sangat penting untuk memastikan bahwa karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran terkait.

Karya seni Desa Sibangkaja cukup berkembang, sehingga sudah seharusnya masyarakat bertanggungjawab untuk melindungi warisan budaya dan seni yang mereka miliki. Masalah plagiarisme atau peniruan dan penggunaan karya seni tanpa izin kerap terjadi, hal ini dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi dan non ekonomi bagi pencipta dan pemilik karya seni. Maka dapat disimpulkan urgensi pendaftaran hak cipta karya tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung adalah untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan karya seninya. Perlindungan tersebut berupa hak moral untuk mencantumkan nama saat karya digunakan secara umum, serta hak untuk mempertahankan keutuhan karya tanpa batas waktu menurut undang-undang dan memperoleh hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan karyanya.

3.2 Mekanisme Pendaftaran Hak Cipta Karya Tari Sekar Sibang Di Desa Sibangkaja Kabupaten Badung

Tata cara atau mekanisme pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66 ayat 1 UUHC dan *website* resmi Kemenkumham. Ketika melihat ketentuan Pasal 66 ayat 1 UUHC dapat dipahami bahwa Ketika pencipta ingin mencatatkan atau mendaftarkan ciptaannya bisa mengajukan permohonan tertulis menggunakan Bahasa Indonesia

¹² Maharani, Desak Komang Lina; Parwata, I Gusti Ngurah. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 10, (2019) : 2303-0569.

¹³ Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya 7*, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04>.

¹⁴ Shania, Intan, dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 1*, no. 2 (2017) : 59-69.

kepada Menteri. Untuk mengajukan permohonan tersebut bisa melalui *online* atau secara elektronik dan juga secara langsung atau non-elektronik. Ketika mengajukan permohonan baik secara elektronik maupun non-elektronik harus memenuhi syarat dengan melampirkan contoh atau sampel dari ciptaan, produk ciptaan, surat pernyataan kepemilikan ciptaan serta membayar biaya pendaftaran. Proses pencatatan atau pendaftaran tari Sekar Sibang dapat dilakukan secara online dengan dibantu oleh pihak Kemenkumham. Pendaftaran elektronik bertujuan untuk memudahkan pencipta dalam mendaftarkan karya di waktu dan tempat yang mereka pilih.¹⁵

Dalam ketentuan Pasal 67 UUHC dapat dipahami untuk pengajuan pencatatan karya cipta di Kemenkumham dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Konsultan HKI yang sudah terdaftar, dan Kantor Wilayah Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui secara esensial sama atau tidaknya suatu karya yang telah diciptakan atau produk hak terkait dengan ciptaan yang tercatat dilakukan pemeriksaan oleh Menteri dan Menteri akan memberikan keputusan maksimal 9 (Sembilan) bulan sejak diterimanya permohonan yang memenuhi syarat, hal ini diatur dalam Pasal 68 UUHC. Apabila permohonan sudah diterima oleh Menteri, selanjutnya akan diberikan surat pencatatan ciptaan yang akan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Untuk akses daftar umum ciptaan dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Pasal 6 Bagian Kedua mengenai Permohonan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dapat disimpulkan bahwa pemohon wajib melengkapi dokumen-dokumen berupa fotokopi KTP dari pemohon, apabila pemohon adalah badan hukum wajib menyertakan fotokopi salinan akta pendirian dari badan hukum, beberapa contoh dari karya atau ciptaan, surat pernyataan kepemilikan karya atau ciptaan, surat pengalihan apabila ada pengalihan hak, surat persetujuan pemberian kuasa apabila lebih dari satu pemohon secara bersama-sama, surat kuasa apabila diajukan lewat kuasa, terjemahan Bahasa Indonesia, dan tentunya bukti pembayaran.

Dalam pendaftaran hak cipta karya seni tari Sekar Sibang dapat diajukan dengan pendaftaran *online* atau elektronik, tata caranya sebagai berikut:

1. Pemohon melakukan Registrasi Akun pada *website* <https://dgip.go.id>. Untuk mengakses E-Hak Cipta, pemohon perlu memiliki akun untuk login. Untuk membuat akun pemohon diminta untuk mengisi data kemudian membuat *password* dan *username*.
2. Setelah membuat akun pemohon dapat *log in* dengan *username* serta *password* yang diterima melalui email yang telah didaftarkan. Setelah itu pemohon dapat mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran pada opsi pengajuan pencatatan ciptaan. Untuk formulir pendaftaran berjumlah 2 (dua) rangkap menggunakan Bahasa Indonesia dan kertas polio berganda. Formulir pendaftaran tersebut memuat identitas serta kelengkapan yang berkaitan dengan beberapa hal mengenai karya cipta yang ingin didaftarkan, contohnya seperti penjelasan singkat mengenai tari Sekar Sibang yang ditulis sebanyak 3 (tiga) rangkap.¹⁶
3. Setelah formulir terisi, pemohon harus menyertakan sampel atau contoh serta deskripsi dari karya tari Sekar Sibang. Persyaratan ini mencakup pengiriman sepuluh (10) gambar atau dua (2) rekaman dari tarian Sekar Sibang yang

¹⁵ Lestari, N.M.A.M, dkk. *Op cit.* Hal. 4

¹⁶ Wiryawan, I Wayan. Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta (Suatu Model Pendekatan dalam Peningkatan Perolehan Hak Cipta Bagi Akademisi di Lingkungan Universitas Udayana), Denpasar, *Swasta Nulus*, (2018), 47.

bersangkutan. Untuk membuktikan kewarganegaraannya, pemohon diminta untuk melampirkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian, jika pemohon merupakan badan hukum, mereka harus menyertakan salinan resmi dari akta pendirian yang sudah dilegalakan oleh notaris. Ketika pendaftaran diajukan oleh kuasa, pemohon harus menyertakan surat kuasa untuk mendaftarkan karya ciptanya.

4. Setelah formulir serta dokumen pendukung dan contoh karya tari Sekar Sibang diunggah, pemohon juga harus membayar biaya pendaftaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kemenkumham.¹⁷ Untuk pendaftaran karya cipta tari Sekar Sibang, biaya pendaftaran mencapai Rp. 400.000.
5. Setelah melakukan pembayaran maka permohonan hak cipta tari Sekar Sibang secara otomatis disetujui dan pemohon dapat mengunduh surat pencatatan ciptaan.

Segala persyaratan yang telah dijelaskan di atas, apabila diajukan secara non-elektronik, dapat diserahkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapannya.¹⁸ Setelah pemeriksaan formal, permohonan akan diverifikasi, dan apabila memenuhi syarat, pemohon akan mendapatkan surat pencatatan ciptaan serta nama ciptaan tersebut akan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Untuk pengajuan dengan cara elektronik atau *online*, pemohon dapat menggunakan jasa konsultan HKI atau mengajukan melalui universitas/sentra HKI, serta lembaga pemerintah terkait. Penggunaan jasa konsultan HKI tidak diwajibkan, tetapi dianggap penting untuk memastikan bahwa karya cipta yang didaftarkan terhindar dari masalah hukum di masa mendatang. Pendaftaran dengan menggunakan jasa konsultan dapat memudahkan proses pendaftaran HKI karena permohonan HKI menjadi lebih praktis, namun kekurangannya adalah harus menyiapkan dana yang lebih.¹⁹

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Karya tari Sekar Sibang sebagai maskot Desa Sibangkaja yang dipertontonkan sebagai hiburan sekaligus media untuk memperkenalkan Desa Sibangkaja secara filosofis kepada masyarakat luas perlu untuk mendapatkan perlindungan baik terhadap hak dan kewajiban pencipta dan karya seni. Masalah plagiarisme atau peniruan serta penggunaan karya seni tanpa izin sering terjadi hingga menyebabkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi bagi pencipta dan pemilik karya seni. Oleh karena itu, pendaftaran hak cipta untuk tari Sekar Sibang di Desa Sibangkaja, Kabupaten Badung sangat penting untuk mencegah dan menangani masalah ini dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan karyanya.

¹⁷ Mujiyono, dkk. Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Yogyakarta, (2017), 38.

¹⁸ Jannah, M. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia." *Advocacy scientific journal* 6, No.2 (2018) : 69. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

¹⁹ Satriawan, P. P. P., Kurniawan, I. G. A., & Antari, P. E. D. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali." *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), (2021): 203-225.

Perlindungan ini mencakup hak moral untuk menyertakan nama pencipta ketika karya digunakan secara publik, hak untuk menjaga keutuhan karya tanpa batasan waktu menurut undang-undang, serta hak ekonomi sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan karya tersebut. Pencatatan hak cipta tari Sekar Sibang juga akan mempermudah pencipta dalam membuktikan kepemilikan jika terjadi sengketa terkait karya tari tersebut. Tata cara atau mekanisme pencatatan suatu karya agar terdaftar di Kemenkumham dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham RI atau Kuasa Hukum. Pencipta dapat mengajukan pencatatan karya ciptanya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kuasa Hukum Konsultan HKI yang sudah terdaftar, dan Kantor Wilayah Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Pada saat pengajuan pencipta harus melakukan registrasi akun, melampirkan beberapa dokumen penting, seperti surat-surat sesuai ketentuan yang ditetapkan, formulir pendaftaran yang telah terisi dan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk (KTP), apabila pemohon adalah badan hukum wajib menyertakan fotokopi salinan akta pendirian badan hukum, beberapa contoh dari karya atau ciptaan, dan membayar biaya pendaftaran. Setelah karya cipta tari Sekar Sibang didaftarkan pencipta akan memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya memungkinkan pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptanya, seperti royalti dan pendapatan dari penampilan atau penjualan, proses pembuktian kepemilikan lebih mudah jika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap karya ciptaan tersebut, mencegah terjadinya pelanggaran terkait dengan karya dari pencipta dengan adanya perlindungan hukum sehingga pencipta dapat mengambil tindakan hukum jika haknya dilanggar. Dengan demikian, pencatatan karya cipta Sekar Sibang di Ditjen HKI Kemenkumham tidak hanya melindungi hak-hak pencipta secara legal, tetapi juga memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan ekonomis dari karya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dharmawan, N.K.S., dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 35.
- Mujiyono, dkk. *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. (Yogyakarta, 2017), 38.
- Wiryan, I Wayan. *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual Optimalisasi Perolehan Sertifikat Hak Cipta (Suatu Model Pendekatan dalam Peningkatan Perolehan Hak Cipta Bagi Akademisi di Lingkungan Universitas Udayana)*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 47.

Jurnal :

- Ariasih, Ni Putu Epy, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Legal Analogy Journal* 3, No.1 (2021):113. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3030.111-115> .
- Jannah, M. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia." *Advocacy scientific journal* 6, No.2 (2018) : 69. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Johani, Sang Ayu Nyoman; Wiryan, I Wayan; Mudana, I Nyoman. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 8, (2019) : 2303-0569.
- Latifah, Siti & Anthon Fathanudien. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Kuningan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

- Hak Cipta (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan).” *Mahkamah*, Vol. 5, No.1 (2020). [10.24235/mahkamah.v5i1.6564](https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6564).
- Lestari, Ni Made Astri Mas, dkk. “Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online.” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 5, No. 2 (2017) : 1-6.
- Maharani, Desak Komang Lina; Parwata, I Gusti Ngurah. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 10, (2019) : 2303-0569.
- Ningsih, Wahyu Kartika, dan S.H. Inayah. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Tradisional Kethek Ogleng Pacitan.” PhD diss., (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p04>.
- Putri, Yunita Maya. “ Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung.” *Jurnal Sumbangsih* 2, No. 1 (2021). [10.23960/jsh.v2i1.29](https://doi.org/10.23960/jsh.v2i1.29).
- Rumbekwan ,R.G.E. “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga.” *Lex Crimen Journal* 5, No.3 (2016) : 130.
- Satriawan, P. P. P., Kurniawan, I. G. A., & Antari, P. E. D. ”Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali.” *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), (2021): 203–225.
- Shania, Intan, dan Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017) : 59-69.
- Tian Marlionsa, A A Ngr; Sukihana, Ida Ayu. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, (2017) : 2303-0569.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kemenkumham.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.